

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Malaysia merupakan negara di Asia Tenggara yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini sekitar 30 juta jiwa, yang terdiri dari 3 bangsa utama yakni Melayu, Cina dan India.

Kemerdekaan Malaya, Pulau Pinang dan Malaka dicapai pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan nama Federasi Malaya. Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia. Termasuk dengan Federasi Malaya.

Dalam perjalanan federasi ini kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Singapura pada 1965 karena adanya ketidaksesuaian dengan Perjanjian Pembentukan Malaysia dengan dipicu oleh politik diskriminasi, dan

pertikaian antar-ras di dalam Insiden 13 Mei pada 1969.¹ Setelah Insiden 13 Mei pada 1969, kebijakan ekonomi baru yang kontroversial yaitu upaya penaikan hasil bagi kue ekonomi bumiputra pribumi, yang menyertakan sebagian besar orang Melayu, tetapi tidak selalu penduduk asli dibandingkan dengan kelompok suku lainnya, diluncurkan oleh Perdana Menteri Abdul Razak. Malaysia sejak saat itu memelihara kesetimbangan politik kesukuan yang lunak, dengan sistem pemerintahan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi dan politik yang menyokong keikutsertaan yang pantas dari semua ras.

Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Di antara tahun 1980-an dan pertengahan 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti dibawah kepemimpinan Dr. Mahatir Mohammad. Pada periode ini Malaysia mengalami lompatan dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur dan industri (terutama bidang komputer dan elektronika rumahan). Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru.² Pada periode ini juga, bentang darat Malaysia berubah dengan tumbuhnya beraneka megaprojek. Projek paling terkemuka adalah Menara Kembar

¹ Mohamad, Ardyan. 2012, Kemerdekaan Singapura Hasil Bentrok Ras Dengan Malaysia. <http://www.merdeka.com/dunia/kemerdekaan-singapura-hasil-bentrok-ras-dengan-malaysia.html> Diakses Pada Tanggal 12 juni 2017 Pukul 14.10 WIB

² Sudrajat, Ihwan. 2005. Sindrom Kepercayaan Diri Malaysia. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/16/opi03.htm> Diakses Pada Tanggal 12 juni 2017 Pukul 14.47 WIB

Petronas (sempat menjadi gedung tertinggi di dunia), Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Jalan Tol Utara-Selatan, Sirkuit F1 Sepang, Multimedia Super Corridor (MSC), bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakun, dan Putrajaya, pusat pemerintahan persekutuan baru. Sampai sekarang, Malaysia merupakan salah satu negara maju dan modern di Asia Tenggara bersama Singapura dan Brunei.

Dibalik kesuksesan dan kemajuan yang diraih oleh Malaysia, terdapat kekhawatiran dari Malaysia mengenai konflik yang terjadi di negara tetangganya Thailand. Konflik yang terjadi di Thailand tepatnya Thailand bagian selatan sudah berlangsung sejak Ayutthaya menginvasi Pattani tahun 1688. Pattani sempat merdeka ketika Ayutthaya diserang Burma namun kembali berada di bawah naungan Siam ketika Dinasti Chakri menginvasi Pattani dan membagi kerajaan Pattani menjadi beberapa provinsi yang terpisah dari Pattani seperti Yala, Satun dan Narrathiwat.³

Dibawah pemerintahan Muangthai yang Buddha, sebagai kelompok minoritas, mereka memperoleh perlakuan diskriminatif. Birokrasi negara yang berorientasi Thai-Buddha mengisolasi mereka bukan hanya dalam proses politik tapi juga kultural, agar sesuai dengan kebutuhan integrasi nasional. Upaya itu gagal. Kebijakan lebih keras dijalankan rezim Phibul Songkram pada 1938, yang menekankan asimilasi berbagai budaya minoritas ke budaya monoetnik.

³ Ishii, Yoneo.1998. The Trade From Southeast Asia: Translations from the Tosen Fusetsu-gaki 1674-1723. Institute of Southeast Asian Studies: Singapura

Upaya integrasi itu menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Melayu-Muslim Thailand Selatan yang menyebabkan identitas budaya mereka terancam. Mereka juga mengeluhkan marjinalisasi budaya, bahasa, dan ekonomi. Sehingga hal ini memicu munculnya gerakan separatis untuk kemerdekaan Pattani. Pada 1947, Haji Sulong bin Abdul Kadir, kepala Dewan Provinsi Islam Pattani, mempelopori perlawanan terhadap Bangkok. Dia memimpin kampanye petisi penuntutan hak otonomi, bahasa, budaya, dan penerapan hukum Islam. Haji Sulong, bersama beberapa pemimpin agama dan anggota parlemen Muslim, ditangkap, dibebaskan, lalu tidak jelas keberadaannya. Dia menjadi simbol perlawanan etnis Melayu-Muslim terhadap pemerintah Thailand.⁴

Pergolakan yang terjadi hingga sekarang masih terus berlanjut.⁵ Kasus seperti pengeboman, penembakan, pembakaran sekolah, dan penculikan, diantaranya bisa dikatakan terjadi hampir setiap hari. Kasus yang terjadi di Thailand Selatan yang selalu di beritakan ini terjadi paling banyak di provinsi Narathiwat, Pattani dan Yala. Dan beberapa kekerasan juga terjadi di beberapa distrik di Songkhla, yang juga didominasi oleh etnis muslim Melayu di beberapa distrik tersebut, juga di Hat Yai yang merupakan daerah

⁴ Chiong Liow, Joseph. 2009. Islam, Education, and Reform in Southern Thailand: Tradition & Transformation. Institute of Southeast Asian Studies: Singapura

⁵ Kompas.com. 2016. Bom Hantam Sekolah di Thailand Selatan, Bocah Empat Tahun Tewas. <http://internasional.kompas.com/read/2016/09/06/15011701/bom.hantam.sekolah.di.thailand.selatan.bocah.4.tahun.tewas>. Diakses pada tanggal 12 juni 2016 pukul 18.22 WIB

penghubung sekaligus kota terbesar di Thailand Selatan. Sampai sekarang konflik Thailand Selatan telah menewaskan lebih dari 6.500 orang.⁶

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Thailand terutama dengan provinsi-provinsi di Selatan Thailand. Malaysia memiliki kedekatan sejarah, bahasa, agama dan budaya dengan masyarakat di Selatan Thailand. Hal ini membuat Malaysia mempunyai rasa tanggung jawab moral dan merasa memiliki kepentingan untuk ikut membantu penyelesaian konflik di Selatan Thailand. Selain itu, Malaysia ikut mendapatkan dampak dari konflik ini. Akibat dari konflik yang berkepanjangan banyak warga Pattani yang mengungsi dan mencari suaka ke Malaysia. Hal ini karena jarak geografis yang dekat, yakni perbatasan antara Thailand dengan Malaysia hanya dibatasi oleh daratan. Tidak hanya itu, para separatis yang dicari pemerintah Thailand juga kerap memasuki wilayah Malaysia. Tentu Malaysia khawatir dengan keadaan tersebut.

Malaysia sebagai negara tetangga Thailand dan sebagai negara yang berbatasan langsung dengan wilayah konflik Selatan Thailand mulai terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut pada tahun 1998 ketika Tun Mahathir Muhammad menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia.⁷ Dimana pada masa itu pemerintah Thailand dan pemerintah Malaysia melakukan diplomasi untuk mendapatkan jalan yang terbaik untuk perdamaian di Thailand Selatan

⁶ Ibid.

⁷ Walker, P. Denis. 2005. *Conflict Between the Thai and Islamic Cultures in Southern Thailand (Pattani) 1945-2005*, University Kebangsaan Malaysia Islamyat (27) 5. Hal. 101

dan untuk beberapa tahun Thailand Selatan menikmati fase damai.⁸ Namun hal tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2001 konflik kembali memanas.

Pada tanggal 30 Agustus 2005 terdapat 131 pelarian masyarakat Muslim Selatan Thailand menyeberangi perbatasan dan masuk ke wilayah Kelantan, Malaysia untuk menghindari konflik di negaranya. Selain itu para separatis tak jarang memasuki wilayah Malaysia untuk menghindari pengejaran dari militer Thailand yang tentu saja hal ini bisa menimbulkan gangguan keamanan bagi Malaysia. Hal ini membuat Malaysia khawatir yang disebabkan karena kedekatan geografis antar kedua negara serta kekhawatiran akan perluasan konflik Pattani ke Malaysia. Pada akhirnya Malaysia memetakan rangkaian upaya untuk mengakhiri ketegangan gerakan separatis di wilayah selatan Thailand. Berbagai macam kunjungan dan upaya di tempuh demi terciptanya perdamaian di wilayah Thailand Selatan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini adalah :
Bagaimana Upaya Malaysia dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan ?

⁸ Chalk, Peter. 2008. *The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand: Understanding the Conflict's Evolving Dynamic*, RAND: National Research Institute

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui sejauh mana upaya serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Malaysia dalam penyelesaian konflik di Thailand selatan.

D. Landasan Teori

Teori resolusi konflik.

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak yang bertikai⁹

Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat diakhiri.

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional.

⁹ Sondole, Dennis. 1993. Conflict Resolution Theory and Practice: Integration and Application. Manchester: Manchester University Press. Hal 44.

Morton mendefinisikan resolusi konflik sebagai sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik¹⁰. Jadi, dapat dikatakan resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan upaya penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan tersebut baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga baik oleh negara maupun Organisasi Regional maupun Organisasi Internasional.

Konflik Thailand Selatan merupakan konflik bekepanjangan yang disebabkan karena adanya perbedaan dari segi sosial, ekonomi, bahasa, budaya dan agama antara daerah Utara dan Tengah Thailand dengan bagian Selatan Thailand. Beberapa penyelesaian konflik telah dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam menyelesaikan konflik Selatan Thailand seperti penyelesaian konflik secara langsung (negosiasi) antara pemerintah Thailand dengan separatis. Bahkan pada masa pemerintahan Yingluck Shinawatra telah diadakan lima kali perundingan untuk menyelesaikan konflik Selatan Thailand, namun sampai sekarang penyelesaian secara langsung (negosiasi) belum mampu menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu konflik ini beberapa kali diselesaikan dengan menggunakan keterlibatan orang ketiga. Keterlibatan

¹⁰ 11Alo Liliweri. 2005. Prasangka & Konflik. LKIS: Yogyakarta. Hal. 289

orang ketiga dalam konflik tersebut disebabkan karena penyelesaian secara langsung belum mampu menyelesaikan konflik Thailand Selatan.

Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu¹¹ :

1. Peace-Keeping

Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Menurut definisi ini, untuk konflik yang terjadi antara pemerintah Thailand dengan separatis Thailand Selatan dapat dikesampingkan karena upaya perdamaian yang dilakukan berlangsung tanpa intervensi militer manapun. Hal ini sesuai dengan ASEAN Way, yaitu kebiasaan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan dengan lebih mengedepankan upaya diplomasi, tekanan, dan pencegahan sedemikian rupa sehingga tanpa melibatkan aksi militer asing¹².

2. Peace-making

Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui fasilitasi,

¹¹ Hermawan, Yulius. 2007. Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hal 93

¹² Masilamani, Logan and Peterson Jimmy. 2014. The "ASEAN Way": The Structural Underpinnings of Constructive Engagement. <http://www.foreignpolicyjournal.com/2014/10/15/the-asean-way-the-structural-underpinnings-ofconstructive-engagement/> Diakses Pada Tanggal 14 juni 2017 16.32 WIB.

mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Dikaitkan dengan kasus ini pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

3. Peace-building

Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan negative peace (atau theabsence of violence) berubah menjadi positive peace dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Berdasarkan tahap-tahap penyelesaian konflik diatas, Malaysia sebagai negara yang terlibat dalam penyelesaian konflik di Selatan Thailand telah melakukan tahap-tahap penyelesaian konflik seperti peace-making dan peacebuilding. Dalam tahap peace-making Malaysia berusaha untuk mempertemukan separatist Pattani dan pemerintah Thailand untuk melakukan mediasi dengan cara damai. Hal ini dapat dilihat dari seringnya Malaysia menjadi tuan rumah untuk penyelesaian konflik Selatan Thailand dan berperan

menjadi fasilitator. Sedangkan dalam tahap peace-building pada penyelesaian konflik Thailand Selatan, Malaysia melakukan kerjasama-kerjasama serta membuat MoU dan naskah 3E dengan pemerintah Thailand seperti di bidang Sosial dan ekonomi untuk mensejahterakan penduduk Thailand Selatan yang mana provinsi-provinsi di Selatan Thailand merupakan salah satu provinsi termiskin dan dengan tingkat pendidikan terendah di Thailand. Hal ini ditujukan untuk meredam ketimpangan dan kecemburuan sosial serta untuk meredam separatisme di Thailand Selatan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang : Bagaimana upaya malaysia dalam penyelesaian konflik di Thailand selatan?

2. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data skunder. Data skunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Sumber data yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel, internet, pengamatan berita di televise serta sumber lain yang masih relevan dengan penelitian.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik penelitian ini akan menggunakan data dokumen yaitu dengan mengumpulkan data melalui dari buku, jurnal, artikel, internet, surat kabar, dan sumber daya lainnya yang terkait.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dikskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini data yang dikumpulkan bukan berupa data angka melainkan data penggambaran mengenai suatu perilaku atau fenomena. Teknik analisa data ini yaitu mendiskripsikan suatu situasi atas secara populasi tertentu bersifat factual secara sistematis dan akurat, berdasarkan data-data berupa buku, jurnal, artikel, internet dan sumber daya lain yang berkaitan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang :

- Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai :

- Hubungan Malaysia - Thailand.
- Sejarah dan dinamika konflik yang terjadi di Thailand Selatan serta dampaknya terhadap Malaysia.

BAB III, akan membahas mengenai :

- Upaya perdamaian yang dilakukan Malaysia terhadap konflik Thailand Selatan.

BAB V, berisi tentang rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan bab yang telah dibahas, dan saran.

